

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, Staatblad tahun 1847 Nomor 23

Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5893

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2006 Nomor 1.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri tentang tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995, Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 23 .

Buku:

Anand, Ghansham, 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta :Zifatama Publisher.

Abdulkadir Muhammad, 2004 . *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung, Cet. I, PT. Citra AdityaBakti,

Adjie, Habib .2014, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung. Refika Aditama

¹Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2002. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar., Pustaka Pena Press,.

Anshori, Abdul Ghofur , 2009 .Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika, Yogyakarta UII Press.

Army. Eddy, 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* . Jakarta . Penerbit Sinar Grafika,.

Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta ; Pt.Raja Grafindo Persada,

Diantha, I Made Pasek, 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Denpasar : Prenada Media Group.

Effendy, Marwan . 2014 *Teori Hukum dari Perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Jakarta . Referensi Cetakan Pertama.

Hasibuan, Albert 1997 . *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Jakarta . Pustaka Sinar Harapan,

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta . Cahaya Adma Pusaka,

- Hilman Hadikusuma, 2018 *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung PT . Alumni, Cetakan kelima,
- Huda, Chairul, 2006 . *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Iskandar , Mia Aminati, 2003. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta, Referensi (GP Press Group), Cetakan Pertama.
- Kartanegara. Satochid,(Tanpa tahun) *Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang. P.A.F, 1997 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Leden Marpaung, 2005. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika,
- Maramis, Frans .2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Marpaung, Leden. 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud , 2005 . *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana,
- Mertokusumo.Sudikno, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- , 2018, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta Cahaya Atma Pusaka, Cetakan kelima,
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta. Diesrede UGM,
- , 1993 . *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta,
- , 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cet. ke21* Jakarta: Bumi Aksara,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Nawawi, Arief Barda. 2014 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam penanggulangan Kejahatan*. Bandung Citra Aditya Bakti

- Prasetyo, Teguh . 2010, Depok Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada,
- Prodjodikoro. Wirjono,1989 . *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*,Bandung: Eresco,
- ¹Ramelan, 2009 . *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan,
- Rifai, Ahmad , 2017 *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta Sinar Grafika, Cetakan ketiga
- Salim, HS. 2019 Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah,(PPAT) Rajawali Pers,
- Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Sumardjono, Maria S.W. 2001 *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, Jakarta Kompas,
- Soerjono, Soekanto,1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,
- ¹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,.
- Soesilo, R, . 1995 *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap- pasal Demi pasal*, Bogor : Politeia
- Soemitro, Ronny Haniatjo. 1990 *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia,
- Syamsudin, Muhammmad, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Syamsu, Muhammad Ainul, 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Telaah kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Prenada Media Group
- Tobing. G.H.S.Lumban , 1983 . *Peraturan Jabatan Notaris*,Cet.3, Jakarta: Erlangga,
- Toegarisman, M.Adi , 2016. *Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi*, Jakarta .Kompas Media Nusantara,.

Tresna, R . 1989 . *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Limited.

Utrecht, E., 1965 Rangkaian Sari Mata Kuliah Hukum Pidana II, cetakan ketiga, Bandung: PT. Penerbitan Universitas.

----- 1968 *Hukum Pidana I*, 1968 Bandung Penerbit Universitas Bandung,

Karya Ilmiah:

Agus Santoso yang berjudul Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya. Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol.04 No. 1 .2020

Hidayat, Reza , *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi “ E-Journal Katalogis , Volume 3 Nomor 12, Desember 2013*

Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat et.al, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Magister Kenotariatan Universitas Udayana 2017 – 2018

Muqaddas, Busyro , 2002 “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, Yogyakarta, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* .

Ruben Achmad dan Henny Yuningsih yang berjudul Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana. In: Prosiding "Dari Riset menuju advokasi", 25-26 November 2016, Palembang.

Tresya, SH, MH,. Dosen Tetap PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang berjudul Analisis Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jurnal Wajah Hukum Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017

Sumber Lainnya:

Audita Nurul Safitri, et. Al , Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016) <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60> (diakses 10 Nopember 2020).

Bahan presentasi Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sebagaimana yang diunduh <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas/> diakses tanggal 10 Nopember 2010.

Hariyanto. M “ Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana & Kesalahan”, Artikel GAKKUM LHK, <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/10/>

pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana.html diakses tanggal 10 Nopember 2010

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyertaan_\(hukum_pidana\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyertaan_(hukum_pidana)) diakses tanggal 28 Juli 2020

<https://rmco.id/baca-berita/nasional/43112/kasus-suap-ketok-palu-apbdtulungagung-kpk-pengembangan-perkara-dimungkinkan-bisa-saja-ada-tersangka-baru> diakses tanggal 10 Nopember 2020

<https://www.kompasiana.com/2608/55009389813311501afa7857/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia>

<http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

Makalah Koordinator Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Jampidum Kejagung yang disampaikan oleh dr. Heri Jerman, SH.MH pada saat Seminar Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sekaligus Rapat Pleno Pusat Yang Diperluas (RP3YD) .

Nyoman Serikat Putrajaya, *Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan Dalam Hukum Pidana*, makalah pada Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum universitas Gajah Mada dengan masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminalogi Indonesia, Yogyakarta 23-27 Februari 2014 Hlm;11

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Lux Jakarta : Widya Karya. 2014 .

Safitri, Audita Nurul, et. al “ Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016) “ <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60> (diakses 10 Nopember 2020)

Tri Jata Ayu Pramesti, Perbedaan Notaris dan PPAT, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509f7875153dc/perbedaan-kode-etik-notaris-dengan-ppat/> diakses tanggal 16 Nopember 2020

Widia, Siska et. al, “ Tanggungjawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

66Pk/Pid/2017) <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1058/0>
(diakses 10 Juli 2020)